

**ANALISIS STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN ACEH TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PAHMAN MAHMUD

NIM. 180503027

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Prodi Ilmu Perpustakaan



**PRODI ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Analisis Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Berdasarkan Peraturan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah)**

Diajukan Oleh :

Pahman Mahmud

NIM. 180503027

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Perpustakaan**

Disetujui oleh:

Pembimbing


Nazaruddin, M.LIS., Ph.D

NIP. 197101101999031002

A R - R A N I R Y

Disetujui oleh Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan


Mukhtaruddin, S.Ag., M.LIS.

NIP. 197711152009121001

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Perpustakaan**

Pada Hari/Tanggal

Senin, 02 Juni 2025
25 Dzulqaidah 1446 H

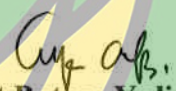
Darussalam – Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYA SKRIPSI

Ketua

Sekretaris


Nazaruddin, S.Ag,S.S, M.L.I.S., Ph.D
NIP. 197101101999031002


Cut Putroe Yuliana,S.IP.,M.IP
NIP. 198507072019032017

Penguji I

Penguji II


Nurcahmi, M.Pd.
NIP. 197902222003122001


Drs. Syukrinur, M. LIS.
NIP. 19680125000031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Syarifuddin, M.Ag., Ph.D
NIP. 197001011997031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pahman Mahmud

Nim : 180503027

Prodi : S1 Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Analisis Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan,


A R - R P A N
METERAI TEMPEL
558F6AMX329178272

Pahman Mahmud

NIM. 180503027

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menuntut ilmu serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Hanya dengan izin-Nya, perjalanan akademik ini dapat dilalui hingga tahap akhir. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam.

Skripsi ini berjudul "**Analisis Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah)**". Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan yang dihadapi, baik karena keterbatasan pengalaman maupun pengetahuan yang masih perlu terus dikembangkan. Namun, berkat rahmat Allah SWT serta doa, kerja sama, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua, serta adik dan kakak yang selalu memberikan semangat, dukungan luar biasa, serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora beserta jajarannya, serta Bapak Mukhtaruddin, S.Ag., M.LIS selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Bapak T. Mulkan Safri, M.IP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Bapak Nazaruddin, M.LIS., Ph.D yang telah berkenan menjadi pembimbing skripsi ini. Beliau telah

memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 10 Maret 2025

Penulis.

Pahman Mahmud



DAFTAR ISI / OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Sarana Dan Prasarana	15
1. Definisi Sarana Dan Prasarana	15
2. Manfaat Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana	17
3. Faktor Yang Mempengaruhi Sarana Dan Prasarana	18
C. Perpustakaan Umum	19
1. Definisi Perpustakaan Umum	19
2. Tujuan Dan Fungsi Perpustakaan Umum.....	20
D. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Rancangan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu.....	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Subjek dan Objek Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	31
G. Kredibilitas Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah	42
Gambar 4.2 Gedung Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah	44
Gambar 4.3 Wawancara Dengan Ibuk Mariati Selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.....	45
Gambar 4.4 Gedung Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah...	46
Gambar 4.5 Wawancara Dengan Ibuk Mariati Selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. SK Pembimbing Tahun Akademik 2022	66
Lampiran 2. Surat Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar- Raniry Banda Aceh.....	67
Lampiran3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah	68
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	69
Lampiran 5. Foto-Foto Penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah.....	72
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup Penulis	73



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian adalah pegawai, staf dan pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah sebagian besar telah memenuhi standar Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024, namun masih terdapat kekurangan dalam fasilitas bagi kelompok penyandang disabilitas, teknologi informasi dan sistem keamanan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga diperlukan dukungan finansial dari pemerintah daerah atau kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar lebih inklusif dan optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci : Standar Perpustakaan, Sarana & Prasarana dan Peraturan Perpustakaan Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi sarana dan prasarana di banyak perpustakaan umum masih menjadi permasalahan serius, termasuk di Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan observasi, berbagai fasilitas dasar yang seharusnya tersedia sering kali tidak memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini menjadikan perpustakaan jauh dari harapan pemustaka, baik dari segi kenyamanan, aksesibilitas, maupun fungsionalitas sebagai pusat informasi dan pembelajaran. Penelitian mengenai sarana dan prasarana perpustakaan menjadi menarik karena perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung literasi dan pembelajaran masyarakat. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perpustakaan umum belum mampu menyediakan fasilitas yang memadai sesuai standar nasional. Misalnya, masih terdapat perpustakaan tanpa gedung permanen, tata ruang yang tidak ergonomis, serta minimnya fasilitas teknologi seperti komputer, internet, atau perangkat keamanan yang memadai.¹

Saat ini, standar sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional mencakup berbagai aspek, seperti gedung perpustakaan, perabot, peralatan teknologi, fasilitas umum, dan aksesibilitas untuk kelompok rentan. Peraturan ini menggarisbawahi bahwa setiap perpustakaan provinsi harus memiliki gedung permanen dengan luas minimum yang disesuaikan dengan tipe perpustakaan, fasilitas umum seperti toilet dan lahan parkir, serta kelengkapan teknologi untuk mendukung layanan digital. Selain itu, aspek keamanan, estetika, dan

¹ Andi Mudassir, *SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN BERDASARKAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN*, Ruang Karya, 2023.

kenyamanan juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Namun, kenyataannya banyak perpustakaan umum, termasuk di Aceh Tengah, belum dapat memenuhi kriteria tersebut. Gedung perpustakaan sering kali berlokasi di tempat yang kurang strategis, dengan fasilitas yang jauh dari prinsip ergonomik dan aksesibilitas. Fasilitas teknologi seperti komputer dan koneksi internet sering kali terbatas, sementara fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya hampir tidak tersedia. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan pengembangan sarana prasarana perpustakaan sangat mendesak untuk dilakukan agar perpustakaan dapat berfungsi optimal sesuai dengan standar dan harapan pemustaka.²

Perpustakaan umum memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui penyediaan akses terhadap sumber-sumber informasi, pengetahuan, dan literasi. Sebagai pusat informasi yang inklusif, perpustakaan umum wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Namun, hingga saat ini, masih banyak perpustakaan umum yang belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Permasalahan ini sangat memengaruhi efektivitas layanan yang diberikan serta berdampak pada tingkat kunjungan, minat baca, dan kebermanfaatan perpustakaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis standar sarana dan prasarana perpustakaan umum menjadi sangat relevan, khususnya dengan adanya pembaruan aturan yang tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024.³

² Fitri Mutia, 'Sarana Dan Prasarana Ruang Perpustakaan Sebagai Aspek Kekuatan Dalam Mengembangkan Perpustakaan.', *Jurnal Palimpsest*, 3.1 (2011), pp. 1–8.

³ Septevan Nanda Yudisman, 'Analisis Peran Perpustakaan Umum Sebagai Ruang Publik Dari Perspektif Teori Sosial Public Sphere Jurgen Habermas', *Maktabatuna: Jurnal Kajian Kepustakawanan*, 2.2 (2020), Pp. 157–72 <<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/download/2990/2020>>.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 merupakan acuan terbaru yang mengatur standar sarana dan prasarana perpustakaan, termasuk perpustakaan umum. Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti ukuran ruangan, fasilitas fisik, teknologi, aksesibilitas, serta keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan. Pembaruan ini hadir sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan informasi masyarakat serta tantangan perpustakaan di era digital. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan seluruh perpustakaan umum dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana demi memberikan layanan yang lebih baik, efektif, dan ramah bagi penggunaanya.⁴

Namun, implementasi standar ini tidak selalu berjalan mulus. Di berbagai daerah, masih ditemukan perpustakaan umum yang tidak memenuhi kriteria minimal sarana dan prasarana yang ditetapkan. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya perhatian dari pihak pemangku kebijakan, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan perpustakaan sesuai standar. Akibatnya, kondisi fisik perpustakaan menjadi tidak layak, fasilitas teknologi terbatas, dan aksesibilitas bagi kelompok berkebutuhan khusus pun masih rendah. Hal ini tentu menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan literasi dan kualitas layanan perpustakaan. Perpustakaan seharusnya menjadi tempat yang mendukung aktivitas membaca, belajar, dan berkegiatan bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, tujuan ini sulit tercapai.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perpustakaan umum telah memenuhi standar sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Perpustakaan

⁴ E. Aminudin Aziz, 'Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum', Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2024, Pp. 1–65.

⁵ Penny Ismiati Iskak And Juznia Andriani, 'Analisis Kualitas Ruang Perpustakaan: Studi Kasus Pada Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian', *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 22.2 (2015), P. 69, Doi:10.21082/Jpp.V22n2.2013.P69-79.

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual sarana dan prasarana perpustakaan dengan standar yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar tersebut serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di perpustakaan umum. Penelitian ini penting dilakukan karena perpustakaan umum merupakan sarana strategis dalam meningkatkan literasi dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dengan adanya standar yang jelas dan implementasi yang tepat, perpustakaan umum dapat menjadi lebih fungsional, ramah pengguna, dan mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang disediakan.

Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten aceh tengah awalnya di dirikan pada pada tanggal 15 Desember dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati kepala Daerah Tk.II Aceh Tengah No. 041/074/1980 dan diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1981 sebagai perpustakaan umum yang belum di jadikan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten aceh tengah, dan Pada bulan Desember 2016 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah resmi berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah sesuai Qanun Daerah Kabupaten Aceh Tengah no. 3 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Ir. ABADI, Pada tahun 2017 dipimpin oleh Bapak Subhan Sahara, S. Sos, sesuai SK Bupati Aceh Tengah No. 821/226/BKPSDM/2017.⁶

Berdasarkan observasi awal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah yang berlokasi di Jln. Commodore Yos Sudarso No. 6 Takengon, Aceh Tengah, peneliti menemukan sejumlah problematika terkait tata ruang dan kenyamanan fasilitas yang tersedia. Gedung perpustakaan ini memiliki letak yang strategis karena

⁶ Bulkisma Putri, 'Analisis Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah', 9 (2022), Pp. 356–63.

berada di pusat kota, berdekatan dengan kampus IAIN Takengon dan berhadapan langsung dengan Masjid Raya Ruhama Aceh Tengah. Selain itu, keberadaannya yang tidak jauh dari kantor pemerintahan, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya menjadi keunggulan tersendiri karena memudahkan akses pengunjung. Namun, meskipun memiliki lokasi yang strategis dan fasilitas dasar seperti ruang baca, koleksi umum, koleksi referensi, ruang multimedia, sirkulasi, layanan wifi, penitipan tas, dan toilet, tata ruang perpustakaan dinilai belum memenuhi standar kenyamanan dan efektivitas layanan bagi pemustaka.

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah penggabungan antara ruang pengadaan, pengembangan, dan sirkulasi menjadi satu ruangan. Penggabungan fungsi ini menimbulkan kesan sesak dan kurang terorganisir, yang pada akhirnya memengaruhi kenyamanan pemustaka. Tata ruang seperti ini tidak sesuai dengan standart-standart penataan perpustakaan yang ideal, di mana setiap ruang seharusnya memiliki fungsi yang spesifik dan tertata dengan baik. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi estetika ruangan, tetapi juga dapat menghambat kelancaran proses layanan informasi bagi pengunjung. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena tata ruang yang kurang baik dapat berdampak negatif pada jumlah kunjungan dan tingkat kepuasan pengguna layanan perpustakaan.

Selain itu, meskipun pustakawan selalu berupaya untuk menata ruangan agar nyaman digunakan, keterbatasan ruang dan kurangnya penataan yang sistematis masih menjadi tantangan. Fasilitas seperti ruang baca dan ruang multimedia terlihat belum sepenuhnya optimal dalam mendukung aktivitas literasi dan pembelajaran. Misalnya, ruang baca sering kali bercampur dengan area sirkulasi, yang menyebabkan gangguan bagi pengunjung yang membutuhkan suasana tenang untuk membaca atau belajar.

Ditambah lagi, beberapa koleksi buku terlihat belum ditata dengan baik, sehingga menyulitkan pemustaka dalam mencari bahan bacaan yang dibutuhkan.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan umum daerah harus mampu mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.⁷ Oleh karena itu, standar penyelenggaraan perpustakaan harus menjadi acuan dalam penataan ruang, pengadaan koleksi, serta penyediaan layanan yang berkualitas. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat kekurangan dalam memenuhi pedoman tersebut. Fasilitas dan teknologi informasi yang disediakan belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kebutuhan pemustaka yang beragam latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan ulang terhadap tata ruang dan sarana prasarana agar perpustakaan dapat lebih efektif berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti satu topik dengan judul **“Analisis Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana perpustakaan umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 ?

⁷ ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN’, 2007, p. 245.

2. Apa saja upaya faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana perpustakaan umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengentahui kondisi sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi upaya faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana perpustakaan umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori mengenai standar sarana dan prasarana perpustakaan umum, khususnya dalam konteks peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Nomor 2 Tahun 2024. Dengan menganalisis penerapan peraturan ini pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan regulasi nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru terkait standar operasional yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan kebijakan terbaru.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan perbaikan fasilitas perpustakaan, serta sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa perpustakaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi lain yang berkepentingan dalam pengembangan perpustakaan umum di daerah lain untuk meningkatkan kualitas layanan serta kenyamanan pengunjung perpustakaan.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian, maka uraian istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai suatu proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik itu dalam bentuk tulisan maupun tindakan, untuk memahami kondisi sebenarnya, termasuk asal-usul dan inti permasalahannya. Secara mendalam, analisis melibatkan aktivitas berpikir yang bertujuan memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini membantu mengidentifikasi elemen-elemen penyusun, hubungan di antara elemen tersebut, serta peran masing-masing dalam membentuk kesatuan yang utuh. Secara etimologis, istilah "analisis" berasal dari kata Yunani kuno "analusis," yang berarti memisahkan atau menguraikan. Dalam hal ini, analisis

adalah metode untuk membagi suatu topik kompleks menjadi bagian-bagian sederhana, sehingga dapat dipahami secara lebih jelas dan mendalam.⁸

Analisis standar adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengukur perbedaan antara kondisi nyata dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini melibatkan pemeriksaan secara mendalam terhadap berbagai elemen yang ada dalam suatu sistem, untuk kemudian dibandingkan dengan pedoman, peraturan, atau norma yang berlaku.⁹

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah dua konsep yang saling terkait dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan atau fungsi. Sarana merujuk pada segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang aktivitas tertentu, seperti peralatan, fasilitas, atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas dasar yang mendukung operasional sarana tersebut, seperti gedung, jalan, jaringan listrik, dan sistem komunikasi.¹⁰

Sarana dan prasarana dapat juga dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai komponen penting dalam setiap sistem atau organisasi. Sarana merujuk pada alat atau media yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses, baik itu berupa barang, perangkat, atau teknologi yang mendukung kelancaran operasional.¹¹

Dalam penelitian ini, istilah Analisis standar sarana dan prasarana merujuk pada kajian mendalam terhadap kesesuaian fasilitas dan infrastruktur yang

⁸ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Kbbi.Web.Id*, February, 2020, p. 2020.

⁹ Khamim, 'Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Indonesia', *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4.1 (2019), P. 125, Doi:10.33511/Misykat.V4n1.125-144.

¹⁰ Ahmad Sopian, 'Manajemen Sarana Dan Prasarana', *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4.2 (2019), pp. 43–54, doi:10.48094/raudhah.v4i2.47.

¹¹ Anis Zohriah, 'Analisis Standar Sarana Dan Prasarana', *Tarbawi*, 1.2 (2015), pp. 53–62.

dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, seperti luas bangunan, ketersediaan ruang baca yang nyaman, koleksi buku yang memadai, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta kelengkapan fasilitas penunjang seperti internet, komputer, dan peralatan multimedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana sarana dan prasarana perpustakaan umum di lokasi penelitian telah memenuhi ketentuan nasional, serta mengevaluasi kekurangan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat.

3. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum di Indonesia memiliki landasan hukum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Regulasi ini memberikan pengertian serta kerangka hukum yang jelas bagi keberadaan dan operasional institusi perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, perpustakaan umum didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang dirancang untuk melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Perpustakaan umum berfungsi sebagai fasilitas pembelajaran yang mendukung proses belajar sepanjang hayat bagi individu dari berbagai latar belakang. Hal ini mencakup seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi, sehingga menjadikannya sebagai tempat inklusif untuk mengakses pengetahuan dan informasi.¹²

¹² 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN', *Demographic Research*, 1985.1 (1988), pp. 4-7.

Perpustakaan umum adalah sebuah fasilitas yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga swasta dengan tujuan menyediakan akses informasi kepada masyarakat secara luas. Perpustakaan ini menawarkan koleksi buku, jurnal, majalah, serta materi digital yang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa adanya batasan usia atau latar belakang pendidikan.¹³

4. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa Perpustakaan Provinsi harus memiliki gedung strategis di lahan milik pemerintah dengan fasilitas yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Gedung dilengkapi ruang koleksi, baca, sirkulasi, serta perabot dan teknologi pendukung, termasuk akses untuk kelompok rentan. Fasilitas umum seperti parkir, ruang ibadah, dan toilet juga disediakan, dengan perhatian khusus pada keamanan gedung dan perawatan koleksi. Aturan ini bertujuan menciptakan perpustakaan yang inklusif dan layak untuk masyarakat.¹⁴

Dalam penelitian ini Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang standar sarana dan prasarana perpustakaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perpustakaan umum di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penyediaan ruang, fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perpustakaan agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada

¹³ M. R. Hendrawan, 'Peran Perpustakaan Umum Dalam Membangun Masyarakat Informasi: Sebuah Telaah Ruang Publik Jürgen Habermas. Dalam Prosiding Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia', *Semiloka Kepustakawanan Infonesia 2015 "Library Move On: Bangga Menjadi Profesional Di Dunia Perpustakaan Dan Informasi."*, November, 2015, p. 343, doi:10.13140/RG.2.1.4247.4961.

¹⁴ 'Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum'.

masyarakat. Dalam penelitian ini, Peraturan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menganalisis kondisi sarana dan prasarana perpustakaan umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar yang diatur dalam peraturan ini dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di daerah tersebut.

